



**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN  
JASA VIDIOGRAFI ANTARA AGENSI X  
DENGAN PENYEDIA JASA Y**

Oleh:

Ilstra Dayanara MNG<sup>1</sup>, Sai'da Rusdiana, S.H., LL.M.<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jasa vidiografi antara Agensi X dengan Penyedia Jasa Y, serta untuk mengetahui dan mengkaji bentuk wanprestasi dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak dalam hal terjadinya wanprestasi perjanjian jasa videografi.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris karena berdasarkan kenyataan dan permasalahan di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber-sumber hukum yang ada di masyarakat. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik pengambilan data yang dipakai adalah penelusuran berbagai dokumen beserta bahan-bahan pustaka untuk penelitian kepustakaan dan melakukan wawancara secara langsung terhadap responden untuk penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan dengan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jasa videografi antara Agensi X dengan Penyedia Jasa Y tidak diterapkan pada fase *post* kontraktual. Kedua, terdapat dua bentuk wanprestasi yang terjadi yaitu dilaksanakannya prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan serta tidak dilaksanakannya prestasi sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak dalam hal terjadi wanprestasi yaitu melalui penyelesaian diluar pengadilan dengan mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Perjanjian Jasa Vidiografi, Wanprestasi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



**IMPLEMENTATION OF GOOD FAITH PRINCIPLE IN  
VIDEOGRAPHIC SERVICE AGREEMENT BETWEEN  
X AGENCY AND Y SERVICE PROVIDER**

By:

*Ilstra Dayanara MNG<sup>3</sup>, Sai'da Rusdiana, S.H., LL.M.<sup>4</sup>*

**ABSTRACT**

*This legal writing aims to identify and review the implementation of good faith principle in the videographic services agreement between X Agency and Y Service Provider, and to learn and to review the forms of default as well as settlement efforts made by the parties in the event of a breach in the videography service agreement.*

*This research is a juridical empirical research since it is based on the reality and problem found in real practice. Such factual situation is then linked to the prevailing laws and regulations as well as sources of law in the community. Data used in this study consist of primary data and secondary data, which are obtained through field and library research. The data are collected by exploring various library materials and documents for library research and by conducting direct interviews with respondents for field research. Data obtained from this study is further analyzed by qualitative method and presented with a descriptive way.*

*Based on the research result and analysis, conclusions are obtained. First, the good faith principle is not implemented during post-contractual phase of the videographic service agreement between X Agency and Y Service Provider. Second, there are two forms of default occurred, which are the performance of duty but not in accordance with what was agreed upon, and not performing its duty as previously agreed. Settlement efforts done by the parties for the defaults are through out-of-court settlement with mechanism of deliberation to reach consensus.*

*Keywords: Principle of Good Faith, Videographic Service Agreement, Breach of Contract.*

---

<sup>3</sup> Undergraduate Student at Department of Civil Law in Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>4</sup> Lecture at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada